

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka membutuhkan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Mudrajad, 2006 dan Todaro, 2009). Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan, serta juga perekonomian suatu wilayah atau negara yang semakin membaik. Oleh karena itu, sebagian besar negara, baik maju maupun berkembang banyak yang menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk menilai kualitas sumberdaya manusia.

Pembangunan manusia menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan

ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. (Ginting, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan atau *vicious cyrcle of poverty*. (Sukmaraga, 2011).

Menurut Lanjouw, dkk. (2001) dalam Ginting, et al (2008) dan Mirza (2012) menyatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2010, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat 108 dari 169 negara dengan angka 0,613. Sedangkan pada tahun 2011 IPM Indonesia berada di

peringkat 125 dari 187 negara dengan angka 0,617. Dari peringkat tersebut diperoleh *Gross National Income* (GNI) per kapita berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP) sebesar 3.716 dolar AS, angka harapan hidup 69,4 tahun, angka harapan anak usia sekolah 13,2 tahun dan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia diatas 25 tahun adalah 5,8 tahun. Dengan semakin meningkatnya IPM nasional setiap tahun maka kualitas hidup penduduk Indonesia semakin tinggi meskipun angka IPM Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara lain di dunia.

Pembangunan manusia dapat tercapai apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Peran serta pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagai sumber daya baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (pendapatan) serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) (Azahari, 2000: 57 dalam Siletty, 2012).

Indeks pembangunan manusia bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antarnegara maupun antardaerah (Mudrajad, 2006). Pembangunan manusia menjadi penting karena apabila suatu daerah tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial maka dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun dan memajukan daerahnya. Jadi, sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi Tahun 2006-2010

Provinsi/Nasional	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Aceh	69.41	70.35	70.76	71.31	71.70
Sumatera Utara	72.46	72.78	73.29	73.80	74.19
Sumatera Barat	71.65	72.23	72.96	73.44	73.78
Riau	73.81	74.63	75.09	75.60	76.07
Jambi	71.29	71.46	71.99	72.45	72.74
Sumatera Selatan	71.09	71.40	72.05	72.61	72.95
Bengkulu	71.28	71.57	72.14	72.55	72.92
Lampung	69.38	69.78	70.30	70.93	71.42
Bangka Belitung	71.18	71.62	72.19	72.55	72.86
Kepulauan Riau	72.79	73.68	74.18	74.54	75.07
DKI Jakarta	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60
Jawa Barat	70.32	70.71	71.12	71.64	72.29
Jawa Tengah	70.25	70.92	71.60	72.10	72.49
Yogyakarta	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77
Jawa Timur	69.18	69.78	70.38	71.06	71.62
Banten	69.11	69.29	69.70	70.06	70.48
Bali	70.07	70.53	70.98	71.52	72.28
Nusa Tenggara Barat	63.04	63.71	64.12	64.66	65.20
Nusa Tenggara Timur	64.83	65.36	66.15	66.60	67.26
Kalimantan Barat	67.08	67.53	68.17	68.79	69.15
Kalimantan Tengah	73.40	73.49	73.88	74.36	74.64
Kalimantan Selatan	67.75	68.01	68.72	69.30	69.92
Kalimantan Timur	73.26	73.77	74.52	75.11	75.56
Sulawesi Utara	74.37	74.68	75.16	75.68	76.09
Sulawesi Tengah	68.85	69.34	70.09	70.70	71.14
Sulawesi Selatan	68.81	69.62	70.22	70.94	71.62
Sulawesi Tenggara	67.80	68.32	69.00	69.52	70.00
Gorontalo	68.01	68.83	69.29	69.79	70.28
Sulawesi Barat	67.06	67.72	68.55	69.18	69.64
Maluku	69.69	69.96	78.38	70.96	71.42
Maluku Utara	67.51	67.82	68.18	68.63	69.03
Papua Barat	66.08	67.28	67.95	68.58	69.15
Papua	62.75	63.41	64.00	64.53	64.94
Nasional	70.10	70.59	71.17	71.76	72.27

Sumber: BPS, "IPM Provinsi dan Nasional, 1996-2011".

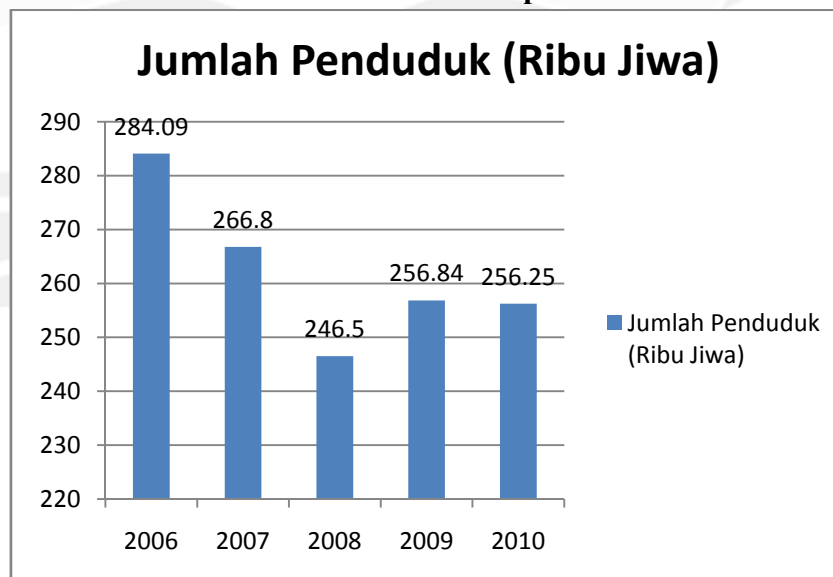
Berdasarkan Tabel 1.1 data IPM Nasional lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia maka semakin tinggi kualitas hidup rakyat Indonesia. Dari data di atas juga terlihat bahwa ada beberapa provinsi yang nilai indeks pembangunan manusianya masih relatif rendah seperti Provinsi Papua Barat yaitu Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, serta Provinsi Sulawesi Barat. Dari kelima Provinsi tersebut Provinsi Papua Barat merupakan provinsi baru hasil dari pemekaran. Provinsi Papua Barat terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan 1 (satu) kota yaitu Kota Sorong. Dari 10 (sepuluh) kabupaten tersebut terdapat 2 (dua) kabupaten baru yaitu Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.

Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa data IPM Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Barat relatif masih rendah. Hal yang sama juga terjadi apabila IPM Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan angka IPM Nasional.

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan setiap tahun. Dari laju penurunan angka kemiskinan

tersebut belum dapat dikatakan sebagai daerah yang angka kemiskinannya rendah. Hal ini disebabkan oleh jumlah angka kemiskinan yang relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 760.42 ribu jiwa. Menurut Statistik Daerah Provinsi Papua Barat (2011) bahwa pada tahun 2010 penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebesar 34,88 persen adalah yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua yang besarnya 36,8 persen. Dengan begitu, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat masih tergolong tinggi sehingga diperlukan program pengentasan kemiskinan untuk Provinsi Papua Barat.

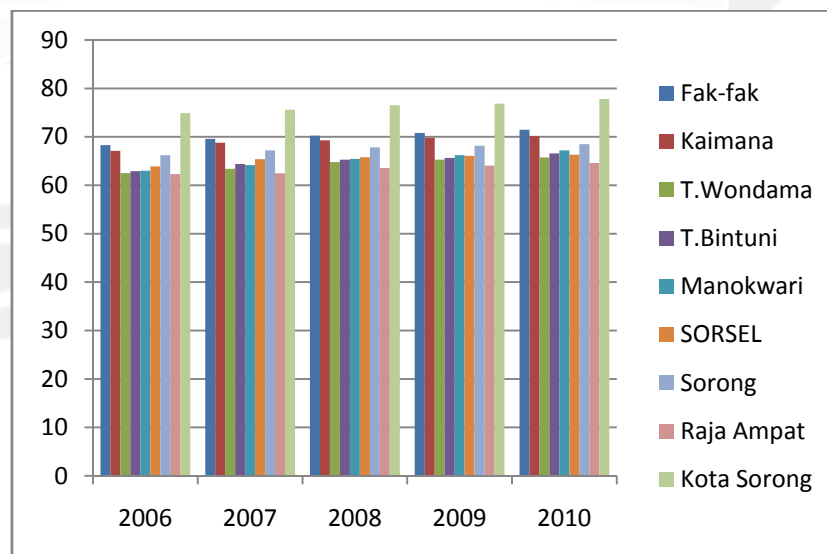
Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2010



Sumber: *Lampiran 1* (hasil olahan *Microsoft Office Excel* 2007)

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa data IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dengan peningkatan capaian IPM ini Provinsi Papua Barat belum dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki kualitas IPM yang baik sebab masih berada dalam peringkat IPM menengah dan masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi lain. Perkembangan capaian nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat ada yang mengalami kemajuan yang begitu pesat dan ada yang lambat. Oleh sebab itu, IPM Provinsi Papua Barat masih perlu diperhatikan untuk ditingkatkan kualitasnya.

Gambar 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Tahun 2006-2010



Sumber: *Lampiran 1* (hasil olahan *Microsoft Office Excel 2007*)

Seiring dengan capaian IPM Provinsi Papua Barat yang masih relatif rendah maka diperlukan perhatian dan perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta juga kemiskinan yang mempengaruhi kualitas IPM. Kemiskinan menjadi efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap antara kemiskinan dan pembangunan manusia pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik.

Pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat perlu mendapat perhatian sebab masih rendahnya capaian nilai IPM yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masalah kemiskinan. Rendahnya nilai IPM yang disebabkan oleh masalah kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati pendidikan, kesehatan serta juga standar hidup yang layak. Untuk meningkatkan kualitas nilai IPM maka dimulai dari perbaikan dan perhatian pada masalah kemiskinan, sektor pendidikan dan kesehatan (sumber daya manusia), serta diikuti dengan sektor-sektor yang lain. Sumber daya manusia perlu diperhatikan karena merupakan modal bagi suatu daerah agar dapat bersaing dengan daerah lain. Dengan demikian, pembangunan di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh angka melek huruf Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 2) Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 3) Bagaimana pengaruh angka harapan hidup Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 4) Bagaimana pengaruh pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan (PPP dalam persen) Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 5) Bagaimana pengaruh kemiskinan Kabupaten/kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh angka melek huruf Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

- 2) Untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 3) Untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh angka harapan hidup Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 4) Untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 5) Untuk menganalisis dan membuktikan seberapa besar pengaruh kemiskinan Kabupaten/Kota terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, sebagai salah satu informasi untuk dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan ekonomi mengenai pembangunan manusia dalam hal peningkatan sumber daya manusia.
- 2) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan baru mengenai pengaruh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

- 3) Bagi Mahasiswa, sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut mengenai indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 4) Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai indeks pembangunan manusia.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumasan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

- 1) Angka melek huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 2) Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 3) Angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 4) Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.
- 5) Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, dibagi dalam beberapa bab secara umum. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, hipotesis penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teori dan studi terkait mengenai indeks pembangunan manusia.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan diuraikan gambaran secara umum mengenai kabupaten atau kota di Provinsi Papua Barat.

BAB IV METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai sumber dan jenis data, variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, metode analisis, model, dan uji statistik.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil perhitungan analisis data penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pembahasan pada bab ini mengurai tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran terhadap penelitian ini.